

DUKUNGAN KOLEKTIVITAS SOSIAL BAGI KEMAJUAN EKONOMI

Oleh : **Dr. Muhamad Supraja, SH, M.Si ***

A. Pendahuluan

Tesis Weber yang mencoba melihat adanya kaitan antara agama dan ekonomi sebagaimana terdapat dalam buku *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*, menunjukkan dengan jelas posisi etika Protestan, terutama Sekte Kalvin dalam mendorong lajunya semangat kapitalisme di Eropa. Melalui data yang dikumpulkannya diperlihatkan bahwa munculnya pengusaha sukses, bankir sukses, pengacara sukses (kelas professional sukses), ternyata keberadaannya tak bisa dilepaskan dari adanya keterkaitan antara doktrin Protestan Kalvin dengan ekonomi kapitalisme. Berkat pengetahuan, penghayatan dan implementasi Etika Kalvin itulah kelas professional yang maju, tumbuh di beberapa negara Eropa, dan dinamika itu pula yang telah mendorong sang sosiolog untuk menelitinya.

BHAKTI • DHARMA • WASPADA

* Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Pasca Sarjana Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak mahasiswa telah tertarik mendalami kajian agama dan perkembangan ekonomi. Mulai dari thesis Weber hingga perkembangan terori komtemporer terkini. Selain mengajar, aktif melakukan kajian dan penelitian tentang perkembangan pemikiran sosiologi agama dan perkembangan ekonomi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan Weber menjadi tonggak yang penting bagi kajian-kajian atas masalah yang sama di masa-masa berikutnya, bahkan sampai hari ini. Meskipun tesis yang telah dirumuskan Weber itu pada akhirnya "mengusik" banyak pemikir baik yang mendukung maupun menolaknya dari berbagai dimensi pemikiran, namun perlu dikatakan bahwa tonggak kajian yang telah dirintis Weber meninggalkan sesuatu yang bernilai secara "akademis". Berbagai pertanyaan yang menggugat tesis itu muncul karena etika agama yang semula berperan besar atas perkembangan kapitalisme barat pada akhirnya secara perlahan-lahan tapi pasti menghilang. Di buku yang telah disebut di atas, dikatakan sendiri oleh Weber bahwa hukum ekonomi kapitalisme dalam perkembangannya telah menggeser etika agama yang semula berjasa melahirkan kapitalisme itu.¹

Persoalan lain yang juga diulas dalam buku tersebut adalah bahwa Weber pada saat yang sama menunjukkan peran etika agama yang pada awalnya memunculkan etos kerja kapitalisme yang dipastikan sebagai *variabel* penting yang berjasa melahirkan kemajuan ekonomi atau kapitalisme awal di Eropa, ternyata mengalami reduksi pada diri penganutnya, terutama dari bentuknya yang semula berupa "etos" terganti oleh "kekuasaan organisasi". Reduksi pada akhirnya hanya mengizinkan mereka yang menjadi anggota organisasi agama Kristen Protestan (Sekte Calvin) yang diperbolehkan mendayagunakan potensi dan peluang sumber daya ekonomi yang terdapat pada agama Protestan. Dengan kata lain, relasi dalam organisasi Kristen Protestan hanya bisa dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi oleh mereka yang telah menjadi bagian dari organisasi, tanpa itu, seorang Kristen Protestan yang memiliki sekte yang sama tak berhak mendayagunakan

potensi ekonomi yang ada dalam lingkup organisasi keagamaan itu.

Pada uraian di atas sangat jelas bahwa agama telah menjadi sangat politis dan sekaligus instrumentalis. Karena di dalam organisasi akan terdapat jumlah anggota, dimana semakin banyak jumlahnya, maka peluang ekonomi yang ada pun semakin besar, baik dari segi jaringan ataupun relasi, demikian juga barang, jasa dan berbagai keperluan lainnya. Kekuasaan dalam konteks itu telah menggeser "kekuatan" etos kerja, dengan aturan hukum atau organisasi. Dari hasil studinya itu Weber juga menyimpulkan bahwa tidak ada semangat kapitalisme di Timur, baik itu pada agama kasta yang terdapat di India maupun pada agama Islam, karena menurutnya karakteristik agama timur tidak memiliki ciri-ciri rasionalitas yang menjadi prasyarat kapitalisme. Pandangan Weber ini jelas memunculkan sejumlah pertanyaan sekaligus keanehan yang tidak kepalang tanggung terlebih setelah tampilnya sejumlah negara di Asia yang meraih kemajuannya lewat industri seperti; Jepang, Korea Selatan, India, Cina. Tampilnya beberapa negara di Asia tersebut di satu sisi telah mematahkan sebagian tesis Weber, namun di sisi lain memperkuatnya.

Religi Sosial dan kemajuan Ekonomi

Jika kita masih menemukan relevansi pemikiran Weber pada kondisi kekinian, maka sebenarnya tesis terpentingnya bukan pada "inkompetensi agama" (Agama Timur dan Islam), sebagaimana telah disinggung di atas, melainkan lebih kepada tesisnya tentang keterkaitan antara "agama" dan "ekonomi", khususnya antara sistem nilai dengan aktivitas kegiatan ekonomi. Beberapa pandangan melihat bahwa sosok pemikiran Weber saat itu tidak bisa dilepaskan sama sekali dari posisinya atau setidaknya keterkaitan dengan pandangan orientalis atau paling tidak pikirannya merujuk pada bahan-bahan yang berasal dari para orientalis generasi pertama pengkaji Agama Timur dan Islam. Kebanyakan orientalis generasi

1 Weber, Max. 1984. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Korean Edition, George Allen & Unwin

tersebut seperti W. Montgomery, H.A.R. Gibb, dll menilai Islam sebagai agama yang tidak produktif, penuh dengan terror, dan kekerasan. Jauh sebelum Weber pun kita sebenarnya juga mendapati bahwa pikiran Karl Marx, ternyata kurang lebih sama, khususnya ketika membahas tentang *The Asiatic Mood of Production*" dimana Timur, dalam hal ini Islam, dan juga Asia digambarkan sebagai tidak memiliki budaya produktif, dan tidak punya kultur kerja yang kuat untuk meraih kemajuan.

Adalah Robert Bellah² yang mencoba mengikuti tesis Weber terkait hubungan agama dan ekonomi di Jepang, meskipun hasilnya sekaligus juga menolak tesis raksasa sosiologi itu, ketika kajiannya menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi di Jepang justru dapat berlangsung dengan cepat karena beroperasinya nilai-nilai tradisional di tataran dunia ekonomi yang diistilahkan sebagai "Religi Tokugawa". Bahkan Jepang juga relatif cepat melakukan recovery sehabis kealahannya dalam perang dunia (PD) II dengan sekutu. Keberhasilan Jepang ini diraih selain karena kontribusi nilai-nilai tradisional yang ada, di bagian lain adalah karena kuatnya komitmen dan dukungan penguasa. Untuk membangun pasarnya di seantero dunia, atau untuk melakukan ekspansi ekonomi, Jepang tidak segan-segan menjalankan politik *dumping*, sehingga produk barang Jepang di luar negeri dapat dijual dengan harga yang murah, sementara di dalam negeri produk sejenis dijual dengan harga yang mahal.

Tetapi selain faktor nilai-nilai cultural yang pro kemajuan, yang tidak kalah penting dikemukakan juga adalah adanya dukungan dari para elit kekuasaan; raja, negara. Oleh sebab itu, di titik ini ada sedikit perbedaan antara Bellah dan Weber, karena pada saat Weber meneliti negara Jerman ketika itu, Republik Weimar tidak melakukan intervensi kebijakan yang dapat mendukung kemajuan kapitalisme, sementara dalam konteks Jepang, nilai-

nilai tradisional yang prokemajuan dipraktekkan dalam ranah ekonomi, dan didukung pula oleh kekuasaan yang ada.

Korea Selatan juga menjadi contoh yang penting, karena negara ini bukan tergolong negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Alam yang keras memaksa orang untuk menaklukkannya, bila tidak, maka sulit bagi seseorang untuk hidup makmur. Oleh sebab itu, kerja keras dan olah potensi sumber daya manusiawi yang dilakukan secara maksimal, akhirnya mengantar Korea Selatan sebagai pemain baru dalam bidang ekonomi. Produk-produk barangnya saat ini berani bersaing dengan produk barang sejenis yang berasal dari Jepang, terutama di bidang industri otomotif, seperti Hyundai, KIA, dsb. Bahkan Korea Selatan saat ini menjadi "kiblat mode" dan "budaya pop" baru anak-anak muda di Asia. Meskipun belum sedahsyat Jepang, namun Korea Selatan saat ini telah menempati posisi penting dalam dunia ekonomi, dan industri. Selain etos kerja keras yang telah mengakar pada budaya masyarakat Korea Selatan, faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dan dukungan politik pemerintah yang kuat. Jadi, selain budaya kerja keras dukungan politik pemerintah juga tidak bisa ditampik. Kehendak untuk menjadi suatu negara industri maju di Korea Selatan nampaknya tidak hanya menjadi visi resmi bangsa, melainkan telah menjadi keinginan semua pihak di sana.

Islam sebagaimana yang digambarkan oleh Maxim Rodinson³, juga termaktub dalam sejarahnya merupakan agama yang sejak awal memperkenalkan pentingnya etos ekonomi, Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sehari-hari kegiatannya tidak lain adalah berdagang. Kitab suci Islam banyak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan, tidak menganjurkan umatnya untuk santai dan membuang waktu dalam kahidupannya, sebagaimana tampil dalam perintah untuk tidak memanipulasi timbangan, tidak boleh melakukan praktek riba (bunga bank),

2 Bellah, Robert N. 1992. *Religi Tokugawa*, Jakarta: Gramedia

3 Rodinson, Maxime. 1974. *Islam and Capitalism*, London: Penguin Books Ltd

prinsip untuk tidak memonopoli kekayaan (harta), anjuran agar harta kekayaan mengalir tidak hanya pada kalangan orang berpunya saja, adanya praktek *zakat*, *infaq shadaqah* kesemuanya menunjukkan bahwa Islam berbicara tentang pentingnya masalah ekonomi, sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan praktek ekonomi kapitalisme dan sosialisme.⁴ Kendati demikian, masalahnya adalah tingginya tingkat diskrepansi antara Islam sebagai sistem nilai atau normatif dengan Islam sebagai realitas yang dipraktikkan dalam perilaku ekonomi sehari-hari. Persoalan tentang diskrepansi ini setidaknya muncul pada kajian yang dilakukan oleh Ruben Levy⁵ terutama dalam kaitannya dengan masalah ekonomi, khususnya persoalan bunga bank dalam masyarakat muslim. Dari kajian Levy tampak bahwa, idealitas Islam lebih banyak tetap tinggal sebagai cita-cita, sementara di dataran praktek yang beroperasi adalah tradisi.

Persoalan kesenjangan sebagaimana telah disinggung di atas sebenarnya tidak harus membuat umat berkecil hati, rendah diri, dan tidak lagi optimis menatap ke depan. Apalagi jika cara pandang yang digunakan umat adalah cara pandang yang melihat sesuatu persoalan dari tatapan proses, dialektika antar berbagai macam aktor kepentingan yang begitu rumit. Di bagian lain, praktek Islam di Indonesia juga sangat beragam, ada yang menginginkan konsistensi antara satunya nilai dan tindakan politik dalam satu kali langkah, ada juga yang melihat dinamika ekonomi Islam dengan cara prosesusual, sebagaimana telah disinggung di atas, dan ada pula yang menghendaki masalah ekonomi dijauhkan sama sekali dari urusan agama. Pandangan umat yang belakangan ini sepenuhnya mengafirmasi total praktek ekonomi yang tengah berlangsung hampir pada sebagian besar komunitas muslim di negara kita.

4 Untuk bahasan tentang ekonomi Islam yang menyatakan bahwa Islam tidak sama dengan kapitalisme dan sosialisme, baca, Baqir as Sadr, Muhammad, 1994. *Iqtisaduna*, Tehran: World Organization for Islamic Services (WOFIS)

5 Levy, Reuben. 1989. *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor

Salah satu isu yang sedang hangat saat ini misalnya adalah menjamurnya praktek bank Syariah. Banyak pertanyaan telah diajukan atas eksistensi perbankan syariah, di antaranya mengapa penyelenggara bank syariah sebagian besar adalah bank konvensional? Apa bedanya perbankan konvensional yang menjalankan prinsip-prinsip berbankannya dengan sistem perbankan kapitalis, dengan praktek bisnis syariah, apalagi modal awal untuk menjalankan bank syariah di perbankan konvensional sebagian besar didukung dari permodalan yang diperoleh dari hasil akumulasi bunga yang terdapat di perbankan konvensional. Dimana juga perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah dalam pemberian aksesnya terhadap kelas menengah bawah? Memang berbagai macam cibiran telah didaratkan kepada praktek bank syariah, misalnya ada yang mengatakan bahwa bank syariah digunakan ketika orang Islam berusia tua, dan menjelang ajal kematiannya, selama masih sehat, maka kecenderungan umat untuk mendayagunakannya sangat rendah. Terlepas dari pro kontra atas keberadaan perbankan syariah, dalam kenyataannya menurut praktisi perbankan syariah dari Malaysia, Dr. Sanusi⁶, bahwa bank syariah memang telah mulai merambah di beberapa negara, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Iran, Indonesia, Inggris, dll.

Di Iran sendiri fenomena perbankan syariah masih menjadi salah satu masalah yang terus menerus dalam perbincangan. Meskipun negara itu berhasil memantapkan dirinya sebagai negara dengan ideologi Islam, lewat revolusi 1979 yang berhasil menjungkirkan rezim sekuler dukungan Amerika, Inggris, dan Israel sebelumnya, tetapi setelah 30-an tahun sebagai Republik Islam praktek perbankan kapitalis ternyata masih menjadi fenomena yang kuat, yang ditandai dengan tingginya tingkat bunga bank. Menurut salah seorang staf *Qharzul Hasanah*⁷ yang sempat penulis wawancarai

6 Informasi tersebut pernah disampaikan Dr. Sanusi dalam rangka Seminar Internasional tentang Ekonomi Islam, di Kampus UNHAS, 2011

7 Wawancara dengan Raja'i, salah seorang staf di

di Iran, tingginya tingkat bunga bank di negeri para mullah itu telah menjadi sasaran kritik para Ayatullah, meskipun mereka juga menyadari bahwa upaya untuk memperbaiki keadaan itu tidak bisa dilakukan seperti membalik telapak tangan, sehingga langkah untuk mewujudkannya tidak ada cara lain, kecuali harus dilakukan dengan perlahan-lahan.

Ekonomi Rakyat dan Dukungan Politik

Terlepas dari keberadaan lembaga perbankan syariah di Indonesia yang statusnya masih tergolong baru, namun pertanyaan menyangkut komitmen dan relevansi lembaga keuangan tersebut bagi ummat perlu dikemukakan. Benarkah lembaga keuangan itu mempunyai komitmen yang kuat untuk mendukung dinamika perekonomian ummat yang menjadi kelompok mayoritas di negeri ini? Kita perlu menyadari bahwa jika berbicara tentang perekonomian Indonesia, tentunya kita perlu mengetahui tentang komitmen negara pada semua aspek kegiatan perekonomian yang dapat mendukung kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan performa ekonomi bangsa. Berbagai kebijakan juga dibuat pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional, meskipun terkadang negara sering menetapkan prioritasnya sendiri dan mengabaikan kelompok-kelompok ekonomi tertentu yang semestinya juga menjadi perhatian dan tanggung jawabnya. Sebagai contoh, sampai saat ini dukungan pemerintah masih sangat minim terhadap sektor kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki modal terbatas. Pelaku kegiatan ekonomi tersebut biasanya dikelompokkan ke dalam sektor usaha menengah yang dikenal dengan UMKM.

Pada sektor UMKM itu terdapat berbagai jenis kegiatan ekonomi, misalnya konveksi, berbagai macam produk industri kerajinan, makanan, alat-alat pertanian, pertukangan, dsb. Selain itu pada sektor ini juga terdapat berbagai dimensi sosial yang saling terkait satu sama lain, seperti relasi sosial,

lembaga Qharzul Hasanah, Qom, Iran, November, 2011

jaringan hubungan, dimensi pengetahuan, teknis, keahlian, produksi, distribusi, dll. Dimensi agama dalam konteks ini juga ikut memainkan perannya yang tidak kecil, seperti pada pembentukan etos kerja, pemanfaatan dan pengelolaan waktu dalam rangka efektivitas produksi, distribusi, dan *trust* di dalam membangun relasi usaha di antara pelaku ekonomi. Kendatipun sektor ini telah memberi kontribusinya yang luar biasa terhadap dinamika ekonomi nasional, terbukti saat krisis ekonomi (awal tahun 2000-an) mengguncang negara, ketika itu pula kita mendapati betapa pentingnya sektor UMKM ini di dalam menyelamatkan perekonomian nasional. Tetapi sayangnya hingga kini Pemerintah tidak banyak "melejitkan" sektor ini agar dapat bersaing diberbagai aras kegiatan ekonomi, baik lokal, nasional, maupun internasional. Pemerintah terkesan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakannya, sehingga wajar apabila terkesan sektor ini dianaktirikan, bahkan dibiarkan begitu saja. Dalam kaitan ini tak terkecuali sektor UMKM yang banyak memanfaatkan pendekatan ilmu dan teknologi sebagai fondasi dasar produksinya.⁸ Pada hal kita tahu di Cina peran industri rumahan dalam memproduksi komponen industri otomotif sangat besar, karena keberadaannya secara keseluruhan dapat memperkuat kemajuan ekonomi bangsa. Hal yang sama juga akan kita saksikan apabila proyek mobil nasional (MOBNAS) yang dirancang sebuah SMK di Solo jadi bergulir. Seperti biasa, Pemerintah nampaknya tidak terlalu antusias menyambut proyek MOBNAS-SMK Solo, sebagaimana kita ketahui dari tiadanya fasilitas yang diberikan dalam rangka untuk mensukseskan proyek tersebut. Bahkan, belum lagi proyek MOBNAS tersebut menuntaskan berbagai proses uji emisi gas buang yang harus diselesaikannya, Pemerintah justru memberi insentif kepada produk mobil murah yang dikeluarkan oleh dua perusahaan otomotif Jepang di Indonesia, yakni Toyota dan Daihatsu yang tengah

⁸ Zuhail, 2010. *Knowledge & Innovation*, Jakarta: Gra-media Pustaka Utama

melansir produk otomotif murahnya; Agya dan Ayla. Tampilnya produk ini memang tidak diakui untuk menghambat laju keberadaan proyek MOBNAS oleh dua perusahaan otomotif Jepang tersebut, namun dampak keberadaan mobil murah yang harganya berkisar dibawah Rp 100.000.000, 00, dengan waktu edar di pasar otomotif mendahului waktu edar MOBNAS, maka sudah jelas hal ini akan berdampak pada terdistorsinya produk MOBNAS di pasaran.

Semula sebelum munculnya produk otomotif murah dari perusahaan Toyota dan Daihatsu (Agya dan Ayla) sambutan masyarakat atas produk MOBNAS yang lebih populer dengan sebutan Mobil Esemka tersebut begitu kuat, namun sayang karena Mobil Esemka yang dirancang oleh anak bangsa (anak-anak Esemka) dengan peralatan yang masih relatif sederhana tersandung pada uji emisi, maka perusahaan otomotif Jepang yang telah teruji disegala aspeknya itu "menenggelamkan" atau setidaknya "menghambat" laju dukungan masyarakat terhadap produk nasional. Dalam konteks Mobnas ini nampak sikap pemerintah yang tidak menunjukkan dukungannya, bahkan seandainya dukungan masyarakat terhadap Mobil Esemka lemah, bisa jadi pemerintah "melarang" atau setidaknya apatis atas realisasi proyek Mobnas oleh sekelompok atau bahkan lembaga pendidikan yang muncul di tengah masyarakat. Gejala tersebut bisa jadi di mata pemerintah ditafsirkan sebagai proyek yang tidak efisien, merusak ekonomi nasional, mengancam investor asing, dll.

Di sisi lain pemerintah nasional kita nampak gamang untuk menegaskan dan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan nasionalisme Indonesia berikut dengan kejelasan parameter-parameter untuk mengukurnya, terlebih di bawah bayang-bayang pengaruh ideologi perdagangan bebas (neo-liberalisme) yang telah diratifikasi pemerintah, kesulitan untuk mendefinisikan itu menjadi semakin bertambah besar. Memang perdebatan apakah kita akan memilih Ekonomi

Kapitalisme vs Sosialisme dianggap telah selesai, dan kita cenderung untuk mengkombinasikan berbagai praktek terbaik dari keduanya, meski tidak mudah. Cina misalnya, tidak mungkin menjadi kekuatan ekonomi baru apabila ideologinya masih bertahan pada gagasan lama. Sebagai negara industri yang membutuhkan "mesin penggerak" ekonomi dan pasar untuk menjual produk industrinya maka mau tidak mau Cina harus tampil lebih terbuka, dan itu artinya Cina menyerap banyak unsur-unsur kapitalisme dalam sistem ekonominya.

Pelajaran lain yang dapat kita petik tatkala Uni Soviet masih menjadi negara dengan ideologi komunis, ternyata masyarakat tanpa kelas itu tak pernah bisa direalisasi. Ideologi, hukum, dan aturan cenderung hanya berlaku dikalangan kaum lemah yang tidak memiliki posisi tawar kekuasaan yang menentukan, sementara hal yang sama sangat sulit diberlakukan bagi kaum elit yang memiliki berbagai macam sumberdaya. Namun, dalam kenyataannya mereka secara sembunyi-sembunyi melanggar asas kehidupan kolektif dengan mengakumulasi kapital sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri ataupun kelompoknya. Tidak sedikit elit kekuasaan, militer dan business yang belakangan terbukti memiliki perusahaan pribadi, pada hal ini jelas-jelas melanggar prinsip kolektivitas yang telah disepakati seluruh rakyat. Oleh sebab itu, munculnya "Perestroika" yang dibawa oleh Gorbachev merupakan lonceng kehancuran bagi ideologi komunis yang nyata-nyata telah menyusahkan kehidupan masyarakat. Rusia saat ini jauh lebih "lincah" dibandingkan dengan dahulu saat masih menyandang identitas ideologi komunisnya, meskipun hingga kini negara tersebut tidak "selincah" Amerika dalam merespon dinamika perkembangan dinamika ekonomi politik.

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, ada begitu banyak pelajaran yang dapat diambil bagi bangsa kita agar terhindar dari kekeliruan fatal yang dapat dialaminya sehingga cita-cita

untuk mencapai puncak kemajuan ekonomi yang dicita-citakan dapat terwujud. Seperti dikatakan mantan Menkeu kita Sri Mulyani⁹, bahwa perdebatan Ideologi Kapitalisme vs Sosialisme sudah tidak lagi relevan, karena perdebatan yang terlalu global sering kali sangat berbeda dengan persoalan riil yang dihadapi di lapangan. Masalah di lapangan bisa lebih kompleks bahkan bisa juga lebih sederhana namun perlu implementasi dan penyelesaian yang konkrit. Misalnya tentang seberapa besar peran negara yang bisa direalisasikan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, karena dalam kenyataannya bahwa tidak semua hal bisa dilakukan dan dipenuhi pemerintah, adakalanya pemerintah harus mengikut sertakan peran swasta.

Meskipun yang merisaukan adalah bila sektor pembangunan yang diserahkan pada pihak swasta memiliki nilai sangat strategis bagi aktivitas ekonomi rakyat, sementara pemerintah sendiri tidak cukup mampu untuk melaksanakannya. Di bagian lain masyarakat dalam banyak hal masih memerlukan dukungan Pemerintah untuk menggenjot kinerja produktivitasnya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional terlebih ketika berhadapan dengan kekuatan kuasa ekonomi politik yang sangat besar baik itu negara maupun aktor ekonomi. Di pasar internasional pemerintah sudah selayaknya bila mendukung terdistribusinya berbagai produk nasional secara fair, khususnya bagi pelaku ekonomi (produsen, pedagang) yang masih tergolong lemah, karena sering kali peran-peran diplomasi politik ekonomi pemerintah lebih efektif ketimbang bila hanya dilakukan secara individual baik oleh perseorangan maupun organisasi ekonomi non pemerintah. Di dalam negeri juga tidak keliru jika pemerintah mendukung pelaku ekonomi yang lemah, terutama ketika berhadapan dengan berbagai macam kekuatan asing seperti MNC, terlebih setelah diberlakukan zona perdagangan bebas. Dukungan pemerintah bisa diwujudkan sesuai dengan relevansi

kepentingan yang dibutuhkan masyarakat, baik akses permodalan, produksi, ataupun dengan memperlancar arus distribusi. Dukungan lain yang tidak kalah penting adalah dengan merumuskan berbagai kebijakan perdagangan dan industry yang kondusif bagi kemajuan perekonomian rakyat. Ambil contoh, dalam kasus proyek Mobnas SMK, pemerintah bisa saja memberi dukungan melalui kebijakan yang mendukung dan melindungi proyek Mobnas, terutama dari tekanan industri otomotif asing yang telah memiliki pasar dan konsumen yang kuat di dalam negeri, setidaknya di masa-masa awal pertumbuhan proyek Mobnas tersebut. Adalah kurang tepat bila pemerintah membiarkan proyek Mobnas yang masih berada di tahap pemula harus dibiarkan berkompetisi dengan produk otomotif asing yang telah mapan di dalam negeri. Selain itu berbagai bentuk insentif dan proteksi juga perlu diberi untuk memacu pertumbuhan kualitas dan kuantitas Mobnas.

Beberapa pelajaran dari negara Industri di Asia, seperti Cina, misalnya, menunjukkan bahwa sikap pembelaan negara terhadap produk nasionalnya terkesan begitu kuat di dunia internasional. Apalagi Cina jauh sebelum dirinya menjadi negara industri yang berpengaruh, ia telah menempati posisi sebagai pemegang Hak Veto di PBB. Oleh sebab itu, ia dapat menggunakan posisi strategisnya untuk kepentingan industri atau ekonominya. Sementara Jepang dan Korea Selatan nampaknya lebih memosisikan dirinya sebagai "sekutu" Amerika, dengan demikian berbagai produk nasionalnya dapat *ingin* pasar global atas dukungan Amerika. Untuk mendapatkan posisi yang aman dan menguntungkan, maka dua negara tersebut mau tidak mau mesti memberikan "kontribusi", "kompensasi", bahkan "upeti" pada negara Amerika, misalnya dengan cara memberi berbagai dana *research* di kampus-kampus, dsb.¹⁰

9 Wawancara dengan Sri Mulyani, dalam, *Prisma*, Vol. 28, Juni, 2009.

10 Baca, Mahbubani, Kishore, 2011. *Asia Hemisfer Baru Dunia*, Jakarta: Percetakan Gramedia

Oleh sebab itu, sudah saatnya bila pemerintah tanpa malu-malu mengambil inspirasi dari berbagai negara di atas untuk sesegara mungkin fokus melangkah mengembangkan ekonomi rakyat. Bertumbuhnya ekonomi rakyat pada akhirnya akan memberi imbas secara tidak langsung pada peningkatan ekonomi nasional. Dengan demikian semakin jelas bahwa persoalan ekonomi rakyat nampaknya bukan terletak pada lemahnya etos kerja, namun lebih pada dukungan pemerintah yang lemah dan sekadarnya. Untuk memperkuat pernyataan ini tentunya beberapa fakta di berbagai bidang usaha, di antaranya sektor UMKM (konveksi, makanan, peralatan pertukangan, kerajinan, obat-obatan), industri otomotif, industri strategis yang berada dibawah kementerian BUMN, seperti PT PAL, PINDAD, Industri Pesawat terbang, kesemuanya dapat menghentak kesadaran kita.

Kreativitas, inovasi, kejeniusan, kompetensi, pengetahuan dan skill yang dimiliki anak bangsa dalam proses daya cipta berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi telah berkali-kali teruji. Keterkejutan kita pun terus berulang tatkala mendengar berbagai produk barang, jasa, desain motif, dll yang memiliki nilai ekonomis tersebut diakui di komunitas internasional. Kita terkejut ketika senjata-senjata buatan PT Pindad diterima dan diakui di pasar internasional, kita juga

bangga saat pesawat buatan PT Nurtanio yang dirakit oleh putera-puteri Indonesia disukai sejumlah negara di Asia untuk alat transportasi, dan unit pengawas pantai beberapa negara Eropa. Kita juga senang ternyata batik konveksi buatan sentra industri rumah tangga yang ada di Jawa muncul di toko-toko pakaian di Shiraz, Iran berdampingan dengan produk sejenis dari Thailand, Malaysia, dll. Padahal selama ini, kita merasa *underdog, nothing*, terhadap "made in Indonesia", dan kita menjadi sadar ketika bangsa lain, pihak lain di luar bangsa kita sendiri dengan rasa penuh percaya diri tampil mengenakan dan memasarkan produk kita.

Betapa sedihnya dan malunya ketika tahu bahwa sebagian senjata api yang kita beli dari negara mitra dagang ternyata produk bangsa sendiri (PT Pindad), betapa jengkelnya kita ketika kopiah yang kita beli dari orang Arab di Arab merupakan produk songkok dari unit UKM di Jawa Timur. Kendati berbagai produk ekonomi rakyat telah diakui di dunia internasional, tapi sampai kini pemerintah kita belum bergerak cepat untuk mengolah potensi ekonomi yang begitu banyak dan beragam yang dimiliki. Lemahnya kemauan dan dukungan politik bila ditelisik lebih jauh bisa jadi akibat gagalnya pemerintah mentransformir diri dari berbagai nilai-nilai komunal, dan fragmentasi kepentingan kekuasaan berjangka pendek.

Daftar Pustaka

Baqir as Sadr, Muhammad, 1994. *Iqtisaduna*, Tehran: World Organization for Islamic Services (WOFIS)

Bellah, Robert N. 1992. *Religi Tokugawa*, Jakarta: Gramedia

Levy, Reuben. 1989. *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor

Mahbubani, Kishore, 2011. *Asia Hemisfer Baru Dunia*, Jakarta: Percetakan Gramedia

Rodinson, Maxime. 1974. *Islam and Capitalism*, London: Penguin Books Ltd

Weber, Max. 1984. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Korean Edition, George Allen & Unwin

Zuhal, 2010. *Knowledge & Inovation*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Jurnal

Prisma, Vol. 28, Juni, 2009.



II



BHAKTI • DHARMA • WASPADA

Pada masyarakat Bali kearifan lokal termanifestasi dalam berbagai slogan, cerita (jokor) dan juga ajaran agama khususnya agama Hindu yang bersumber dari sastra dan lontar. Slogan-slogan seperti Segalak Segilik, Seluhung Sebayan Take, Menyama Braya Tri Hita Karana, Tatwamasi merupakan contoh kearifan lokal masyarakat Bali.

Foto : Agus SB, INFOPUBLIK